



LKJIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

2025

DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PEKALONGAN

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sepanjang tahun 2025. Fokus utama laporan ini adalah memaparkan capaian target kinerja serta efektivitas penggunaan anggaran dalam meningkatkan pelayanan transportasi dan ketertiban lalu lintas di Kota Pekalongan.

Kami menyadari laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat kami harapkan sebagai bahan evaluasi demi peningkatan kinerja dan kualitas pelayanan publik di masa mendatang. Semoga laporan ini bermanfaat bagi semua pihak dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan akuntabel.

Pekalongan, 4 Februari 2026

Kepala Dinas Perhubungan Kota Pekalongan



M. RESTU HIDAYAT, S.SIT., M.T.

Pembina Utama Muda

NIP 19750305 199803 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025 menyajikan capaian kinerja atas Perjanjian Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025. Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2025 memiliki 2 (dua) sasaran strategis dengan total 4 (empat) indikator kinerja, dan 4 (empat) target kinerja yang harus dicapai.

Secara umum, penyelenggaraan pemerintahan di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan pada tahun 2025 dapat dikatakan **Sangat Berhasil**. Capaian kinerja pemerintahan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan ini didasarkan pada hasil pengukuran kinerja sasaran yang dicapai melalui pelaksanaan berbagai kebijakan, program dan kegiatan sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kinerja Perubahan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025.

Selanjutnya hasil analisis terhadap 2 (dua) sasaran strategis yang dijadikan sebagai Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, adalah sebagai berikut:

1. Indikator Nilai SAKIP OPD target yang ditetapkan 76,60.

Berdasarkan penilaian SAKIP yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kota Pekalongan, bahwa untuk penilaian Tahun 2025 nilai SAKIP Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sebesar 77 dengan predikat A. Sehingga capaian untuk indikator nilai AKIP sebesar 100,52%.

2. Indikator Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A target ditetapkan 28%

Berdasarkan Survei Lalu Lintas Kota Pekalongan tahun 2025 oleh Dinas Perhubungan Kota Pekalongan, bahwa terdapat 28 ruas jalan yang mendapatkan kategori A dari total ruas jalan yang disurvei sebanyak 99 ruas jalan. Sehingga capaian untuk indikator persentase kinerja ruas jalan dengan kategori A sebesar 101,01%.

Kinerja keuangan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025 menunjukkan realisasi sebesar Rp 26.495.373.923,00-. atau 94,22 % dari total pagu anggaran sebesar Rp 28.119.270.000,00.

Kendala yang dihadapi :

1. Adanya sisa anggaran pengadaan barang/jasa (selisih nilai pagu dengan nilai kontrak) karena adanya proses negosiasi di dalam kegiatan pengadaan;
2. Anggaran penyediaan gaji dan tunjangan pegawai yang tidak terealisasi sepenuhnya dikarenakan adanya pegawai yang memasuki masa pensiun dan mutasi.

Langkah kedepan :

1. Melakukan penyempurnaan perencanaan dan pengendalian pelaksanaan pengadaan barang/jasa agar anggaran dapat direalisasikan secara lebih optimal;
2. Menyesuaikan perencanaan anggaran belanja pegawai dengan kondisi riil kepegawaian melalui pemutakhiran data pensiun dan mutasi secara berkala.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF.....	iii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI	2
1.3 KONDISI APARATUR.....	4
1.4 SARANA DAN PRASARANA.....	5
1.5 ISU STRATEGIS.....	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026	8
2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026.....	12
2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025.....	14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	15
3.1 PENGUKURAN KINERJA.....	16
3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA	18
3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN	32
BAB IV PENUTUP	37
LAMPIRAN.....	39
IKU PERUBAHAN 2021-2026	39
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025.....	40

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Perhubungan selaku unsur pembantu Kepala Daerah, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kota Pekalongan capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kota, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, maka diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Perhubungan Kota Pekalongan diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2023 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan

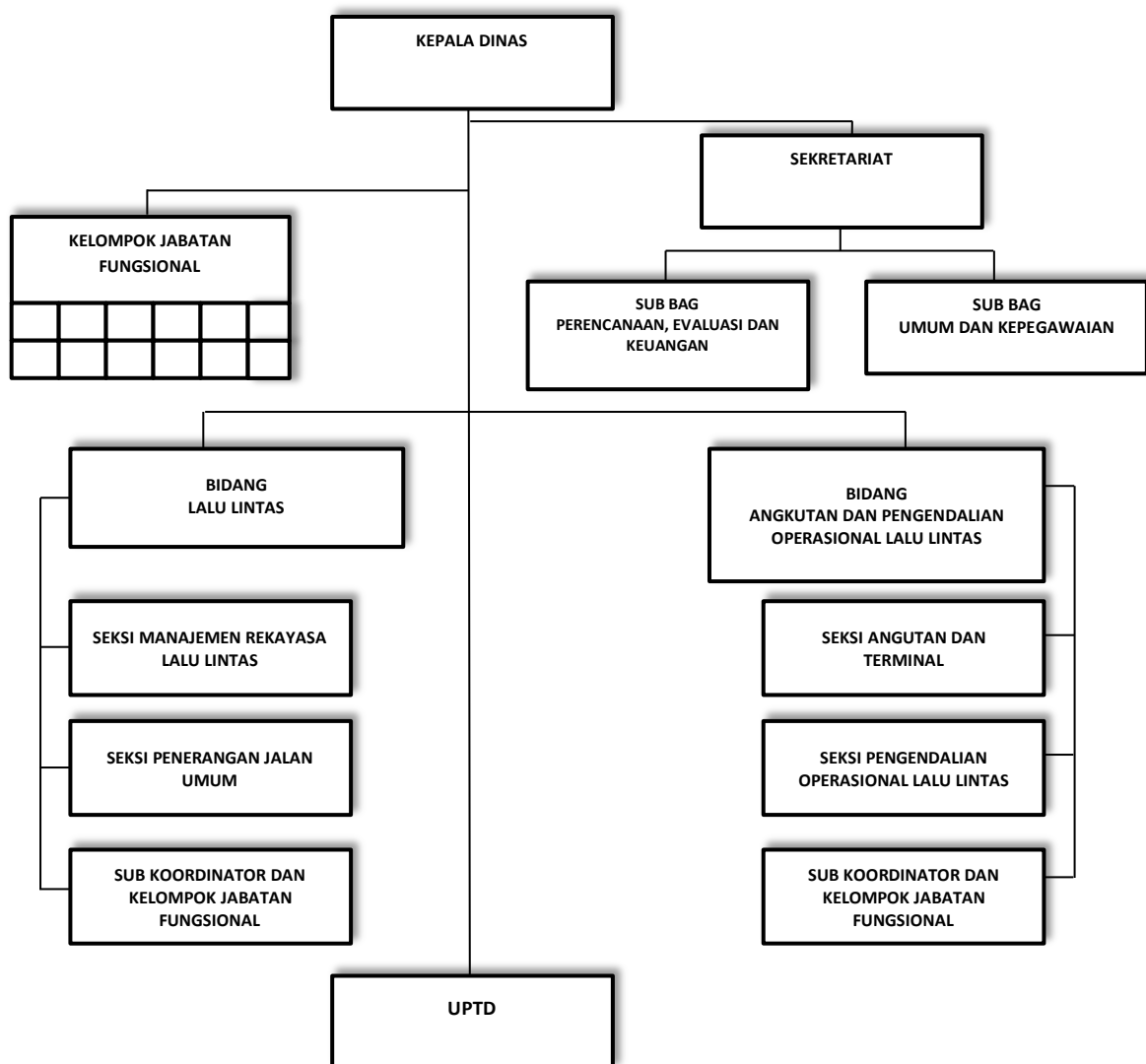
1.2 GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dibentuk sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Peraturan Pemerintah tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan, serta didukung dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan. Berdasarkan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 82 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Dinas Perhubungan Kota Pekalongan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan, dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota Pekalongan melalui Sekretaris Daerah. Tugas pokok Dinas Perhubungan adalah membantu Walikota dalam unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perhubungan serta mempunyai fungsi: Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perhubungan;

1. Perumusan dan penetapan sasaran, program bidang perhubungan;
2. Perumusan kebijakan bidang perhubungan;
3. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang lalu lintas;
4. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang angkutan dan pengendalian operasional lalu lintas;

5. Pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang kesekretariatan;
6. Pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
7. Pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan pelaksanaan tugas; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Dinas Perhubungan dipimpin oleh Kepala Dinas yang dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh pejabat struktural sebagaimana terdapat dalam struktur organisasi di bawah ini.



1.3 KONDISI APARATUR

Kondisi Aparatur menggambarkan profil sumber daya manusia pada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sebagai pendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Uraian pada subbab ini mencakup komposisi pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, jenis kelamin, dan golongan.

1. Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tabel 1.1 Jumlah Karyawan Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah Pegawai
1	Doktor (S-3)	0
2	Pasca Sarjana (S-2)	7
3	Sarjana Strata 1 (S-1)	41
4	Diploma IV (D-IV)	5
5	Diploma III (D-III)	11
6	Diploma II (D-II)	5
7	SMA/SMK	74
8	SMP	1
9	SD	2
Jumlah		146

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan karyawan di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan didominasi tingkat SMA/SMK yaitu sebesar 50,68% dari total pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

2. Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 1.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	OPD	Jenis Kelamin		Jumlah
		Laki-Laki	Perempuan	
1.	Dinas Perhubungan	118	28	146

Berdasarkan Tabel 1.2 di atas, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai laki-laki lebih banyak daripada jumlah pegawai perempuan, yaitu sebesar 80,82% dari total pegawai Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

3. Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaiannya

Tabel 1.3 Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

No	Nama OPD	Status Pegawai				Jumlah
		PNS	PPPK Penuh Waktu	PPPK Paruh Waktu	Tenaga Kegiatan	
1	Dinas Perhubungan	34	2	94	16	146

Berdasarkan Tabel 1.3 di atas, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai dengan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu dibanding status pegawai lainnya yaitu sebesar 64,38% dari total pegawai yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

4. Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Tabel 1.4 Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan PNS

No	OPD	Golongan PNS				Jumlah
		IV	III	II	I	
1	Dinas Perhubungan	4	21	14	0	34

Berdasarkan Tabel 1.4 di atas, diperoleh gambaran bahwa jumlah PNS golongan III lebih mendominasi, yaitu sebesar 61,76% dari total PNS yang ada di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

1.4 SARANA DAN PRASARANA

Sarana dan prasarana yang mendukung tugas dan fungsi Dinas Perhubungan sangat beragam dan mencakup berbagai aspek untuk memastikan kelancaran transportasi dan pelayanan kepada masyarakat. Sarana pendukung

operasional meliputi kendaraan dinas seperti mobil patroli, motor untuk inspeksi, dan kendaraan khusus seperti mobil derek. Selain itu, tersedia pula peralatan seperti *traffic cone*, barikade portabel, rambu lalu lintas, alat pengukur emisi, dan timbangan *portable* untuk kendaraan berat. Jalan raya, marka jalan, lampu lalu lintas berbasis Area Traffic Control System (ATCS), serta rambu tetap dan papan informasi digital juga termasuk dalam prasarana transportasi yang dikelola.

Dinas Perhubungan juga memiliki prasarana untuk pengujian kendaraan bermotor (KIR) seperti gedung pengujian lengkap dengan alat uji rem, emisi, dan kecepatan. Teknologi memainkan peran penting melalui sistem seperti CCTV pemantau lalu lintas, ruang *command center*, serta aplikasi digital seperti e-KIR dan sistem pembayaran non-tunai. Untuk memastikan keselamatan pengguna jalan, tersedia fasilitas seperti pos pemantauan lalu lintas, penerangan jalan umum (PJU), *guard rail*, dan *speed bump* di area rawan kecelakaan. Dalam mendukung administrasi, Dinas Perhubungan memiliki kantor yang dilengkapi ruang kerja, ruang rapat, sistem informasi, dan ruang pelayanan masyarakat. Selain itu, terdapat gudang penyimpanan peralatan lalu lintas, fasilitas pelatihan untuk meningkatkan kompetensi pegawai, dan area parkir kendaraan dinas. Semua sarana dan prasarana ini saling mendukung untuk menciptakan sistem transportasi yang aman, lancar, dan terintegrasi.

1.5 ISU STRATEGIS

Berdasarkan capaian kinerja pelayanan Dinas Perhubungan Kota Pekalongan selama kurun waktu lima tahun ke belakang, serta tantangan dan peluang yang ada, maka dapat diidentifikasi beberapa isu strategis yang akan dihadapi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan yaitu:

1. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi guna mendukung transportasi berkelanjutan;
2. Menurunnya minat masyarakat terhadap angkutan umum;
3. Kurang optimalnya ketertiban lalu lintas dan pengelolaan parkir di kawasan strategis;
4. Belum optimalnya pemenuhan perlengkapan jalan (marka, rambu, *guardrail*, RPPJ, *water barrier*, lampu PJU) dikarenakan keterbatasan APBD Kota Pekalongan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pada penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

2.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2021 - 2026

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis merupakan langkah awal yang harus dilakukan oleh instansi pemerintah agar mampu menjawab tuntutan lingkungan strategis lokal, nasional, global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan pendekatan perencanaan strategis yang jelas dan sinergis, instansi pemerintah lebih dapat menyelaraskan visi dan misinya dengan potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya peningkatan akuntabilitas kinerjanya.

Penyusunan LKjIP Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025 ini, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 dan dokumen Renstra Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Pekalongan Tahun 2021-2026 merupakan Dokumen perencanaan strategis yang disusun dan dirumuskan setiap lima tahun (perencanaan jangka menengah) yang menggambarkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan. RPJMD secara sistematis mengedepankan isu-isu strategis, yang diterjemahkan kedalam bentuk strategi kebijakan dan rencana pembangunan yang terarah, efektif dan berkesinambungan sehingga dapat diimplementasikan secara bertahap sesuai dengan skala prioritas dan

kemampuan anggaran pembiayaan. Perubahan atas RPJMD bertujuan untuk menyesuaikan dengan perkembangan isu strategis dan sebagai tindak lanjut atas evaluasi kegiatan serta kebijakan yang dijalankan.

Tujuan adalah sesuatu (apa) yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisis strategis. Tujuan tidak harus dinyatakan dalam bentuk kuantitatif, tetapi harus dapat menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai di masa mendatang.

Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan.

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah. Program Perangkat Daerah merupakan program-program pada RPJMD Kota Pekalongan tahun 2021-2026 yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kegiatan dan sub kegiatan merupakan bagian dari program yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumber daya, baik berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan, teknologi, dan anggaran sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan dan sub kegiatan yang dipilih untuk setiap program diupayakan dapat menunjukkan akuntabilitas karena merupakan turunan/ *deployment*/cascading dari program serta tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kota Pekalongan.

Tabel 2.1. Matriks Perencanaan Kinerja pada
Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
VISI : Mewujudkan Kota Pekalongan yang Lebih Sejahtera, Mandiri dan Religius		
Misi Ke-4 : Mewujudkan Sarana dan Prasarana Perkotaan Berdasarkan Prinsip Pembangunan Kota yang Berkelanjutan		
Tujuan Kota : Menjamin Layanan Infrastruktur Dasar	Persentase Capaian Layanan Infrastruktur Dasar	
Tujuan Dinas Perhubungan 1 : Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Tingkat Pelayanan Jalan (<i>Level of Service</i>)	B
Sasaran Dinas Perhubungan 1 : Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	28%
Program Dinas Perhubungan 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Ketersediaan Fasilitas LLAJ	97%
Kegiatan Dinas Perhubungan 1 : Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah penyediaan perlengkapan jalan	4 jenis
Kegiatan Dinas Perhubungan 2 : Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	1 kali
Program Dinas Perhubungan 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Kinerja Lalu Lintas Kab/Kota (IKK Outcome)	0,44 ratio
Kegiatan Dinas Perhubungan 3 : Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 4 : Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah titik baru yang diterbitkan izinnya	2 titik per tahun
Kegiatan Dinas Perhubungan 5 : Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan	92%
Kegiatan Dinas Perhubungan 6 : Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan kegiatan persetujuan hasil Analisis Dampak	83%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
	Lingkungan (Andalalin)	
Kegiatan Dinas Perhubungan 7 : Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Jumlah kegiatan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ yang dilaksanakan	2 kegiatan
Kegiatan Dinas Perhubungan 8 : Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu)	Persentase pembinaan awak angkutan umum	30,73%
Program Dinas Perhubungan 1 : Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Persentase Peningkatan Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang Melaksanakan Uji Berkala	0,74%
Kegiatan Dinas Perhubungan 9 : Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase pelaksanaan pelayanan uji berkala (IKK Output)	65,12%
Misi Ke-7 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang efektif dan Efisien Berdasarkan Prinsip-Prinsip <i>Good Governance</i> dan <i>Clean Government</i>		
Tujuan Kota : Meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Reformasi dan Birokrasi	
Tujuan Dinas Perhubungan 2 : Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,39
Sasaran Dinas Perhubungan 2 : Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76,60
Program Dinas Perhubungan 2 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Laporan Capaian Kinerja	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 10 : Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 11 : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi keuangan perangkat daerah	100%
Program Dinas Perhubungan 2 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Ketersediaan Layanan Administrasi Kepegawaian,	100%

Visi-Misi-Tujuan-Sasaran-Program-Kegiatan	Indikator	Target 2025
	Administrasi Umum dan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
Kegiatan Dinas Perhubungan 12 : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 13 : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi umum perangkat daerah	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 14 : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Program Dinas Perhubungan 2 : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengadaan/ Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 15 : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase ketercapaian administrasi barang milik daerah pada perangkat daerah	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 16 : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%
Kegiatan Dinas Perhubungan 17 : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase kegiatan pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%

2.2 INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2021-2026

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai dengan tugas fungsi serta mandat (*core business*) yang diemban. IKU dipilih dari serangkaian indikator kinerja yang berhasil diidentifikasi dengan

memperhatikan proses bisnis organisasi dan kriteria indikator kinerja yang baik. IKU perlu ditetapkan oleh pimpinan Pemerintah Daerah sebagai dasar penilaian untuk setiap tingkatan organisasi dan memberikan informasi mengenai sejauh mana keberhasilan organisasi dalam mencapai target kinerja. Indikator Kinerja Utama yang baik menggambarkan dengan jelas dan terukur hasil kinerja yang diharapkan. Indikator Kinerja Utama yang menjadi tanggung jawab utama Dinas Perhubungan Kota Pekalongan disajikan pada Tabel 2.2.1

Tabel 2.2.1
Target Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	IKU	Satuan	Formulasi	Sumber Data
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Inspektorat Daerah Kota Pekalongan
2	Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori Nilai A	Persen	Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A Tahun N dibagi Total Ruas Jalan Tahun N * 100%	Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

Target yang ditetapkan untuk Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sebagaimana telah dicantumkan dalam perencanaan strategis dan disajikan pada Tabel 2.2.2

Tabel 2.2.2
Target Sasaran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
Tahun 2021-2026

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target					
				2021	2022	2023	2025	2025	2026
1	Meningkatkan Akuntabilitas Perangkat Daerah	Niali SAKIP OPD	Indeks	72,50	74,00	75,50	76,35	76,60	76,85
2	Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori Nilai A	Persen	28	28	28	28	28	28

2.3 PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dokumen Perjanjian Kinerja memuat informasi tentang sasaran strategis yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran, dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Penetapan Indikator Kinerja Kegiatan harus didasarkan pada perkiraan yang realistis dengan memperhatikan tujuan dan sasaran yang ditetapkan serta data pendukung yang ada di organisasi.

Tabel 2.3. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator	2025	
			Satuan	Target
Tujuan :				
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,39
2	Meningkatkan Layanan transportasi Perkotaan	Tingkat Pelayanan Jalan (<i>Level Of Service</i>)	Kategori	B
Sasaran Strategis :				
1	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,60
2	Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori Nilai A	Persen	28

Program	Anggaran	Keterangan
Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp 7.145.634.000,00	APBD-P
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp 20.978.636.000,00	APBD-P

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah.

Dinas Perhubungan Kota Pekalongan selaku pengemban amanah masyarakat Kota Pekalongan melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perhubungan Kota Pekalongan yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan kinerja ini memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026. Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah ini didasarkan pada Penetapan Kinerja dan Indikator Kinerja Utama Renstra Tahun 2021-2026.

3.1 PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dimaksudkan untuk :

- **Pembuatan Kebijakan dan Pengawasannya**
Meningkatkan perumusan kebijakan dengan menyediakan dasar-dasar yang memadai bagi para pengambil keputusan untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai kebutuhan, kinerja pelayanan, dan membuat keputusan realokasi sumber daya jika diperlukan.
- **Arahan Operasional**
Memberikan cara yang lebih sistematis untuk mendeteksi kekuatan/kelemahan operasional untuk melakukan analisa program yang berkelanjutan.
- **Akuntabilitas**
Membantu untuk memperoleh kepercayaan masyarakat dengan memperlihatkan hasil yang baik dari pendapatan yang diterima.
- **Perencanaan**
Memfasilitasi perencanaan strategis dan operasional dengan cara menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam menetapkan tujuan dan sasaran serta merencanakan program-program untuk pencapaian tujuan dan sasaran tersebut.
- **Pengelolaan**
Memberikan dasar bagi identifikasi awal dari adanya penurunan efisiensi operasional dan cara untuk memperlihatkan seberapa efisien sumber daya digunakan dalam penyediaan pelayanan dan pencapaian tujuan.
- **Penganggaran**
Memperbaiki proses anggaran dengan sebisa mungkin membuat keputusan yang objektif mengenai alokasi dan redistribusi sumber daya, pengurangan biaya, dan menginvestasikan kelebihan/surplus dana.
- **Penyediaan pelayanan kepada pihak luar**
Membantu terciptanya iklim yang kompetitif dalam penyediaan pelayanan

oleh pihak luar dengan cara memberikan data biaya dan kinerja yang didokumentasikan dengan baik serta memonitor kinerja pihak kontraktor berkaitan dengan kualitas pelayanan.

➤ **Pengawasan Kerja**

Berguna dalam mencapai kinerja pegawai yang lebih baik dengan memberikan dasar yang obyektif bagi penetapan target kinerja dan memberikan masukan dan insentif.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah.

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2004 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Kerangka Pengukuran kinerja di Pemerintah Kota Pekalongan dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 dan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014. Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai berikut :

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan makin rendahnya kinerja,

digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

2. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja, digunakan rumus :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja Utama} = \frac{\text{Target}}{\text{Realisasi}} \times 100\%$$

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran sesuai Permendagri No. 54 Tahun 2010, menggunakan interpretasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal yaitu:

Tabel 3.1 Pengukuran dengan Skala Ordinal

Skala Ordinal	Predikat / Kategori
90.1 s.d. lebih	Sangat Tinggi / Sangat Berhasil
75.1 s.d. 90	Tinggi / Berhasil
65.1 s.d. 75	Sedang / Cukup Berhasil
50.1 s.d. 65	Rendah / Tidak Berhasil
0 s.d. 50	Sangat Rendah / Sangat Tidak Berhasil

CAPAIAN INDIKATOR KINERJA TUJUAN

Adapun untuk penilaian capaian kinerja tujuan untuk setiap indikator tujuan ditetapkan rumus penghitungan dan skala ordinal sesuai Permendagri No. 54 tahun 2010 sebagaimana penghitungan indikator kinerja utama tersebut di atas.

3.2 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA

3.2.1. Capaian Indikator Kinerja Utama

Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagaimana tabel berikut :

**Tabel 3.1 Pengukuran Kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan
Tahun 2025**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	76,60	77,00	100,52	Tercapai
2	Meningkatkan Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persentase	23,53	28,28	101	Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 100,77% dengan kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil.

**Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Tahun
Sebelumnya**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Capaian Kinerja				Ket
				2022	2023	2024	2025	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	75,65	76,10	77,15	77,00	▼
2	Meningkatkan Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persentase	21	24	23,53	28,28	▲

Keterangan :

- ▲ = Naik
- = Tetap
- ▼ = Turun

**Tabel 3.3 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja sampai dengan Tahun
2025 dengan target akhir Renstra 2026**

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Akhir Renstra 2026	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	77,00	76,85	100,20	Tercapai
2	Meningkatkan Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persentase	28,28	28	101	Tercapai

Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2025 dengan Target Provinsi/Nasional/Internasional

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi s/d 2025	Target Provinsi/ Nasional/ Internasional	Capaian (%)	Kategori
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	BB	BB - A	100	Sangat Berhasil
2.	Meningkatkan Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persentase	28,28	n/a	n/a	n/a

3.2.2. Capaian Kinerja Tujuan

Adapun kesimpulan untuk kategori capaian indikator kinerja tujuan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.5 Realisasi Capaian Kinerja Tujuan Tahun 2025

No	Tujuan	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian (%)	Kategori
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Indeks	78,39	89,04	113,59	Tercapai
2	Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Tingkat Pelayanan Jalan (<i>Level Of Service</i>)	Kategori	B	B	100	Tercapai

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja tabel di atas dapat diketahui:

- 1) Target dengan capaian realisasi tepat dan di atas 100% sebanyak 2 target;
- 2) Target dengan realisasi di bawah 100% sebanyak 0 target;
- 3) Target yang tidak dapat diperoleh hasil pengukurannya sebanyak 0 target.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian kinerja sebesar 106,79% dengan kategori Sangat Tinggi/Sangat Berhasil.

3.2.3. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Capaian indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

Tabel 3.6 Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 1

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Nilai SAKIP OPD	72,50	Indeks	76,10	77,15	76,60	77,00	100,52	76,85

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), telah dilakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja Internal Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Kota Pekalongan memperoleh nilai 77,00 atau predikat "BB". Penilaian tersebut menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kerjanya, kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan yang berorientasi pada hasil di Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sudah menunjukkan hasil yang sangat baik. Capaian evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Kota Pekalongan ini melebihi target nilai SAKIP nasional tahun 2025, dimana KemenPAN RB mendorong instansi pemerintah mencapai predikat minimal "BB" (Sangat Baik) hingga "A" (Memuaskan).

Berikut data rincian hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025 sebagai berikut :

Tabel 3.7 Rincian Hasil Evaluasi AKIP Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Daerah	Bobot	Nilai
1	Perencanaan Kinerja	30	22,87
2	Pengukuran Kinerja	30	23,60
3	Pelaporan Kinerja	15	11,67
4	Evaluasi Akuntabilitas	25	18,87
Nilai Hasil Evaluasi		100	77,00
Tingkat Akuntabilitas Kinerja (Predikat)		BB	

Tabel 3.8. Perbandingan Nilai Evaluasi AKIP dengan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan Tahun 2025

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
1	BKPSDM	84,00

No	Nama Perangkat Daerah	Nilai AKIP Tahun 2025
2	INSPEKTORAT DAERAH	84,75
3	BPKAD	84,60
4	DKP	83,27
5	DINKES	83,25
6	DINDUKCAPIL	82,95
7	SETDA	81,85
8	DINDAGKOP UKM	85,70
9	DPMPPA	83,55
10	BAPPERIDA	88,70
11	KEC. PEKALONGAN UTARA	76,65
12	DINSOS P2KB	76,35
13	KEC. PEKALONGAN BARAT	76,50
14	DINPERPA	76,40
15	BAKESBANGPOL	73,75
16	KEC. PEKALONGAN TIMUR	76,45
17	KEC. PEKALONGAN SELATAN	77,15
18	DPMPTSP	78,00
19	DINDIK	78,50
20	DINPERKIM	74,80
21	DINPERINAKER	75,45
22	DINHUB	77,00
23	SEKRETARIAT DPRD	75,00
24	SATPOL P3KP	75,50
25	DINARPUS	76,10
26	DINPARBUDPORA	78,15
27	BPBD	76,00
28	DPUPR	83,05
29	DLH	85,95
30	DINKOMINFO	83,50

Perbandingan indikator sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan capaian nilai SAKIP Kota Pekalongan pada tahun 2025 sebagai berikut:

No	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi	Keterangan
1	Nilai SAKIP OPD	Indeks	77,00	BB
2	Nilai SAKIP Kota Pekalongan	Indeks	73,28	BB

Analisis keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Adanya kompetensi SDM yang memadai serta kepemimpinan yang berorientasi pada hasil dan akuntabilitas;
2. Pengelolaan anggaran yang efektif, penerapan SOP yang jelas, serta dukungan sarana prasarana operasional turut memastikan target kinerja tercapai secara optimal;
3. Adanya koordinasi dan komunikasi yang baik antar stakeholder di bidang perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi;
4. Adanya dukungan yang kuat dari personil yang membidangi perencanaan dan evaluasi pada Perangkat Daerah;
5. Harmonisasi kebijakan pemerintah dengan partisipasi aktif masyarakat menciptakan lingkungan transportasi yang kondusif bagi pencapaian target kinerja.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/kota.

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.528.000	18.508.000	18.065.600	- Ketersediaan dokumen perencanaan yang matang dan evaluasi berkala memastikan program kerja berjalan sesuai target - Sinkronisasi antara anggaran dan target kinerja meminimalisir

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				deviasi pelaksanaan program di lapangan
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.585.025.000	4.565.320.000	4.070.274.084	- Ketertiban penatausahaan keuangan dan ketepatan waktu pelaporan mendukung transparansi serta akuntabilitas penggunaan anggaran daerah - Pengelolaan kas yang efektif memastikan ketersediaan anggaran untuk operasional seluruh kegiatan perangkat daerah
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	20.000.000	14.972.000	14.834.000	- Penatausahaan aset yang rapi dan terverifikasi mendukung keamanan aset negara dari penyalahgunaan - Pencatatan barang yang akurat memudahkan distribusi sarana prasarana pendukung kerja
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	5.000.000	-	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah	653.680.000	1.214.037.000	1.194.339.810	- Dukungan logistik yang memadai meningkatkan kenyamanan dan produktivitas kerja pegawai
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	65.700.000	72.250.000	65.799.999	- Pengadaan sarana dan prasarana yang tepat waktu dan tepat mutu secara langsung meningkatkan kualitas pelayanan publik dan fasilitas kerja - Terpenuhinya kebutuhan fisik mendukung percepatan pencapaian tugas pokok dan fungsi organisasi
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	745.129.000	721.211.000	673.985.441	- Keberlanjutan jasa penunjang menjamin lingkungan kerja yang kondusif untuk pencapaian target organisasi
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	541.418.000	534.336.000	532.002.850	- Pemeliharaan rutin terhadap aset memperpanjang usia pakai sarana prasarana sehingga menghemat biaya pengadaan kembali di masa depan - Kondisi fisik sarana dan prasarana yang optimal menjamin keamanan dan kenyamanan dalam pelaksanaan urusan pemerintahan

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	- Anggaran: Rp18.508.000 - Realisasi Anggaran: Rp18.065.600 (97.61%)	- Efisiensi SDM tercapai melalui pembagian tugas yang spesifik sehingga proses penyusunan dokumen	- Durasi penyusunan dokumen turun karena : - Validasi data dilakukan secara real-time melalui

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Perangkat Daerah	- Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 2.39% yang berasal dari pemenuhan kebutuhan materi SAKIP dilakukan melalui koordinasi lintas unit kerja, sehingga alokasi honorarium narasumber eksternal dapat diefisienkan.	- anggaran dapat dilakukan secara paralel. - Koordinasi antar unit dilakukan melalui grup kerja digital seperti Whatsapp mempercepat proses sinkronisasi data tanpa perlu banyak pertemuan fisik.	- aplikasi, seperti SIPD dan Seksama - Skema penganggaran telah disepakati di awal sehingga mengurangi durasi revisi yang berulang-ulang pada tahap finalisasi.
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	- Anggaran: Rp4.565.320.000 - Realisasi Anggaran: Rp4.070.274.084 (89.16%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 10.84% yang berasal dari adanya pegawai yang mengalami mutasi dan pensiun.	- Beban kerja verifikasi dokumen berkurang berkat integrasi sistem keuangan digital - Pengalihan fokus SDM dari pekerjaan administratif manual ke analisis data keuangan yang lebih strategis	- Proses rekonsiliasi data keuangan menjadi lebih cepat dari jadwal rutin berkat sistem yang terintegrasi - Penurunan durasi penyusunan laporan bulanan karena otomatisasi entri data
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	- Anggaran: Rp14.972.000 - Realisasi Anggaran: Rp14.834.000 (99.08%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0.92% yang berasal dari pengurangan jumlah laporan yang dicetak menjadi laporan dalam bentuk <i>softfile</i>	- Proses inventarisasi aset dilaksanakan oleh 6 orang yang dibagi menjadi 3 tim yang sebelumnya hanya 2 tim - Koordinasi antar tim dalam pendataan aset dilakukan secara daring melalui grup kerja	- Waktu penyelesaian pendataan aset lebih cepat dari 9 bulan menjadi 5 bulan
Administrasi Umum Perangkat Daerah	- Anggaran: Rp1.214.037.000 - Realisasi Anggaran: Rp1.194.339.810 (98,38%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 1.62% yang berasal dari efisiensi penggunaan sumber daya dalam pelayanan publik tanpa mengurangi kualitas pelayanan	- Staf umum dapat mengelola tugas-tugas operasional kantor dengan lebih efektif melalui pembagian beban kerja yang berbasis pada prioritas layanan harian.	- Distribusi dokumen dan informasi internal menjadi instan melalui kanal digital, sehingga mempercepat proses pengambilan keputusan di tingkat pimpinan.
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	- Anggaran: Rp72.250.000 - Realisasi Anggaran: Rp65.799.999 (91.07%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat	- Proses pengadaan yang transparan melalui sistem elektronik mengurangi intensitas pertemuan fisik dan mempermudah pengawasan oleh tim	- Waktu proses pengadaan bisa dilakukan lebih cepat karena pemanfaatan e-katalog atau katalog elektronik yang memotong jalur birokrasi tender

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	8.93% yang berasal dari pemanfaatan e-katalog untuk mendapatkan harga pasar yang kompetitif	teknis	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Anggaran: Rp721.211.000 - Realisasi Anggaran: Rp673.985.441 (93.45%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 6.55% yang berasal dari kebijakan hemat energi dalam pelaksanaan kegiatan kantor	- Meningkatnya kesadaran kolektif pegawai dalam menjaga penggunaan fasilitas secara mandiri mengurangi kebutuhan akan pengawasan ketat dari staf subbagian umum	- Kecepatan respon terhadap kendala teknis meningkat karena adanya kanal pengaduan langsung dengan pihak penyedia jasa
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	- Anggaran: Rp543.336.000 - Realisasi Anggaran: Rp532.002.850 (99.56%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0.44% yang berasal dari jadwal perawatan rutin yang mencegah biaya perbaikan besar akibat kerusakan mendadak	- Tim pemeliharaan internal mampu menangani perbaikan ringan secara mandiri, sehingga mengurangi ketergantungan pada penyedia jasa luar	- Pemeliharaan rutin secara terjadwal efektif meningkatkan usia pakai fasilitas dan menekan frekuensi gangguan kerja akibat kerusakan alat

Kesimpulan efisiensi :

- Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - Penyerapan anggaran 97,61%;
 - Produktivitas SDM meningkat;
 - Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
- Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - Penyerapan anggaran 89,16%;
 - Produktivitas SDM meningkat;
 - Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
- Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - Penyerapan anggaran 99,08%;
 - Produktivitas SDM meningkat;

- c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
4. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Penyerapan anggaran 98,38%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
5. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Penyerapan anggaran 91,07%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
6. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berjalan dengan tingkat efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Penyerapan anggaran 93,45%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah berjalan dengan efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Penyerapan anggaran 99,56%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.

SASARAN 2 : MENINGKATKAN KAPASITAS JALAN PERKOTAAN

Capaian indikator sasaran Meningkatkan Kapasitas Jalan Perkotaan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.9. Pengukuran Capaian Kinerja Sasaran 2

No	Indikator Sasaran	Kondisi Awal	Satuan	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun 2024	Tahun 2025			Target Akhir Renstra 2026
						Target	Realisasi	% Capaian	
1	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	28	Persentase	24	23,53	28	28,28	101	28

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja di atas, tergambar bahwa indikator

sasaran Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A mencapai target. Hal tersebut didasarkan pada hasil survei lalu lintas pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa sejumlah ruas jalan utama mengalami peningkatan tingkat pelayanan, kelancaran arus kendaraan, serta penurunan tingkat hambatan samping sehingga memenuhi kriteria Kategori A sesuai standar penilaian yang ditetapkan.

Indikator Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori Nilai A merupakan indikator kinerja mandiri Kota Pekalongan sehingga tidak dapat dibandingkan dengan Standar Nasional maupun Provinsi.

Analisis keberhasilan capaian kinerja sebagai berikut :

1. Penerapan Sistem Satu Arah (SSA) di beberapa ruas jalan di Kota Pekalongan sebagai upaya pengurangan kepadatan lalu lintas di Kota Pekalongan;
2. Melakukan Rekayasa Lalu Lintas pada kawasan yang memiliki kepadatan arus lalu lintas;
3. Melakukan patroli rutin di kawasan parkir tepi jalan yang tidak sesuai tempatnya dan pelanggaran pengguna jalan untuk mengurangi tingkat pelanggaran lalu lintas;
4. Melakukan sosialisasi ketertiban lalu lintas pada anak sekolah sebagai upaya memberikan pemahaman tentang tata tertib lalu lintas dalam berkendara di jalan raya agar menjaga keselamatan berkendara di jalan.

Berikut adalah program dan kegiatan serta anggaran yang digunakan guna mendukung indikator kinerja :

a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
Penetapan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.856.700.000	2.946.962.000	2.938.333.872	Telah dilaksanakan sesuai dengan target waktu pelaksanaan kegiatan survei lalu lintas dan pelaksanaan kegiatan pengamanan kegiatan sesuai yang telah ditetapkan.
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.065.512.000	16.240.164.000	15.226.548.293	Telah dilaksanakan sesuai dengan target penyediaan PJU, marka, cermin tikung, dan rambu
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	21.900.000	21.900.000	21.302.000	Telah dilaksanakan kegiatan rehabilitasi halte di Jl. Dr. Wahidin

Kegiatan	Pagu Penetapan (Rp.)	Pagu Perubahan (Rp.)	Realisasi (Rp.)	Alasan Mengapa Kegiatan Tersebut Menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian
				dan halte di Jl. KH. Agus Salim
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	287.880.00 0	675.880.00 0	663.135.846	Telah diterbitkan izin2 (dua) titik parkir baru di Jl. Gajah Mada (Soto Bang Dul dan toko Prima) dan di Jl. Dr. Soetomo (depan warung Pak Awud)
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	177.180.00 0	181.742.00 0	167.786.906	Target peningkatan Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melaksanakan uji tidak tercapai karena belum sadarnya masyarakat untuk melakukan uji kelaikan kendaraan bermotor, sehingga jumlah kendaraan yang melaksanakan uji berkala menurun.
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	535.870.00 0	846.420.00 0	844.350.702	Pengaturan arus lalu lintas yang tepat dan penempatan fasilitas jalan yang sesuai standar berhasil meningkatkan kualitas pelayanan serta kelancaran kendaraan secara signifikan.
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	10.000.000	6.920.000	6.836.000	Proses verifikasi dokumen Andalalin memastikan setiap pembangunan baru telah memiliki perencanaan mitigasi kemacetan yang sesuai dengan kapasitas jalan.
Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	20.510.000	18.552.000	18.224.000	Telah dilaksanakan sesuai dengan target pelaksanaan kegiatan pemilihan awak pengemudi teladan Kota Pekalongan dan kegiatan pembinaan perusahaan angkutan umum.
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	19.500.000	40.096.000	39.554.520	Target pembinaan awak angkutan umum tidak tercapai karena awak becak yang dibina hanya 35 orang dari jumlah total 400 becak yang aktif. hal ini dikarenakan keterbatasan anggaran.

Dari tabel di atas, berikut analisis efisiensi penggunaan sumber daya masing-masing kegiatan pada Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan angkutan Jalan (LLAJ)

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Penetapan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp2.946.962.000 - Realisasi Anggaran: Rp 2.938.333.872 (99.71%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0.29% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan	- Penggunaan perangkat pencacah otomatis (<i>traffic counter</i>) atau aplikasi digital yang mengurangi jumlah surveyor manual di titik pantau.	- Proses pengolahan data survei primer menjadi database digital lebih cepat dibandingkan input manual, mempercepat penyusunan draf rencana.
Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp16.240.164.000 - Realisasi Anggaran: Rp15.226.548.293	- Tim teknis pemeliharaan menggunakan sistem zonasi, sehingga satu	- Penggunaan sistem e-katalog untuk pengadaan barang mempercepat

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
	(93.76%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 6.24% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan dan sisa <i>e-purchasing</i>	tim dapat menangani beberapa titik fasilitas sekaligus secara efektif.	proses administrasi kontrak dibandingkan lelang konvensional.
Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	- Anggaran: Rp21.900.000 - Realisasi Anggaran: Rp21.302.000 (97.27%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 2.73% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan	- Optimalisasi petugas pemeliharaan melalui penjadwalan berkala yang teratur	- Perbaikan kerusakan halte dilakukan dengan sistem respon cepat sebelum kerusakan meluas
Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	- Anggaran: Rp675.880.000 - Realisasi Anggaran: Rp663.135.846 (98.11%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 1.89% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan	- Integrasi verifikasi berkas melalui sistem online, sehingga meminimalkan jumlah staf yang melakukan pelayanan tatap muka	- Pemangkasan birokrasi melalui SOP yang jelas, sehingga durasi penerbitan izin lebih singkat dari batas waktu maksimal.
Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	- Anggaran: Rp181.742.000 - Realisasi Anggaran: Rp167.786.906 (92.32%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 7.68% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan	- Penggunaan sistem pendaftaran uji kir secara online dan alat uji mekanis yang meminimalkan pemeriksaan manual oleh banyak personel.	- Penerapan sistem pembayaran non-tunai mempercepat durasi pelayanan
Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp846.420.000 - Realisasi Anggaran: Rp844.350.702 (99.76%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 0.24% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan	- Pengawasan lalu lintas terpusat melalui ruang kontrol ATCS yang mengurangi kebutuhan penempatan personel polisi pamong praja atau dinas perhubungan di tiap persimpangan.	- Koordinasi antar-instansi dalam Forum Lalu Lintas dilakukan secara rutin melalui pertemuan daring/efektif, sehingga pengambilan keputusan rekayasa lalin lebih cepat.
Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp6.920.000 - Realisasi Anggaran: Rp6.836.000 (98.79%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 1.21% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan	- Pemanfaatan tim teknis internal yang kompeten untuk melakukan verifikasi dokumen teknis secara kolektif.	- Percepatan proses evaluasi dokumen melalui sidang tim teknis yang terjadwal secara periodik dan efektif.
Audit dan Inspeksi	- Anggaran:	- Penggunaan basis	- Pelaksanaan

Kegiatan	Efisiensi Anggaran	Efisiensi SDM	Efisiensi Waktu
Keselamatan LLAJ di Jalan	Rp18.552.000 - Realisasi Anggaran: Rp18.224.000 (98.23%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 1.77% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan	data pengemudi yang terintegrasi memudahkan seleksi awak kendaraan teladan secara objektif.	pembinaan dilakukan secara terpadu dalam satu rangkaian waktu yang kompak untuk efektivitas jadwal peserta.
Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	- Anggaran: Rp40.096.000 - Realisasi Anggaran: Rp39.554.520 (98.65%) - Dari total anggaran, menunjukkan adanya hemat 1.35% yang berasal dari optimalisasi belanja penunjang kegiatan	- Optimalisasi instruktur internal dalam memberikan pembinaan teknis kepada awak angkutan secara berkelanjutan.	- Pengaturan jadwal pembinaan yang sistematis memastikan seluruh awak angkutan mendapatkan edukasi tepat waktu.

Kesimpulan efisiensi:

1. Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota berjalan dengan efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Penyerapan anggaran 99,71%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
2. Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota berjalan dengan efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Penyerapan anggaran 93,76%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
3. Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C berjalan dengan efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Penyerapan anggaran 97,27%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
4. Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir berjalan dengan efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Penyerapan anggaran 98,11%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;

- c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
- 5. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor berjalan dengan efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Penyerapan anggaran 92,32%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
- 6. Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota berjalan dengan efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Penyerapan anggaran 99,76%
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
- 7. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota berjalan dengan efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Penyerapan anggaran 98,79%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
- 8. Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan berjalan dengan efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Penyerapan anggaran 98,23%
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.
- 9. Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berjalan dengan efisiensi yang baik, ditunjukkan oleh:
 - a. Penyerapan anggaran 98,65%;
 - b. Produktivitas SDM meningkat;
 - c. Pekerjaan terlaksana secara tepat waktu dan efisien.

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pengukuran akuntabilitas, selain dilakukan melalui pengukuran kinerja sasaran, akuntabilitas juga dilihat dari realisasi anggaran, yang merupakan bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Selama tahun 2025

pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekalongan. Pagu total belanja Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2025 adalah sebesar Rp 28.119.270.000,- dengan realisasi sampai dengan akhir tahun sebesar Rp 26.495.373.923,- atau sebesar 94,22%. Sedangkan pagu belanja non gaji dan tunjangan sebesar Rp 23.634.629.000,- dengan realisasi sebesar Rp 22.502.749.839.000,- . atau sebesar 95,21%. Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.10.
Anggaran dan Realisasi Belanja Tahun 2025

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.140.634.000	6.569.301.784	92,00
A	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	18.508.000	18.065.600	97,61
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3.401.000	3.401.000	100,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1.568.000	1.567.600	99,97
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	13.539.000	13.097.000	96,74
B	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.565.320.000	4.070.274.084	89,16
4	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.484.641.000	3.992.624.084	89,03
5	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	79.451.000	76.500.000	96,29
6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1.228.000	1.150.000	93,65
C	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	14.972.000	14.834.000	99,08
7	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	14.972.000	14.834.000	99,08

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
D	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-
8	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
E	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1.214.037.000	1.194.339.810	98,38
9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	3.450.000	3.420.000	99,13
10	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	707.950.000	690.520.870	97,54
11	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	11.385.000	11.376.800	99,93
12	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	295.917.000	295.893.500	99,99
13	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	130.464.000	130.158.240	99,77
14	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	2.820.000	2.783.800	98,72
15	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	62.051.000	60.186.600	97,00
F	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	72.250.000	65.799.999	91,07
16	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	72.250.000	65.799.999	91,07
G	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	721.211.000	673.985.441	93,45
17	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.120.000	2.120.000	100,00
18	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, dan Listrik	371.800.000	342.475.029	92,11
19	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	347.291.000	329.390.412	94,85
H	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	534.336.000	532.002.850	99,56
20	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	342.340.000	340.293.500	99,40
21	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	151.220.000	151.178.350	99,97
22	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	40.776.000	40.531.000	99,40
	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN	20.978.636.000	19.926.072.139	94,98

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
	JALAN (LLAJ)			
I	Penetapan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.946.962.000	2.938.333.872	99,71
23	Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	49.000.000	48.246.350	98,46
24	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	2.897.962.000	2.890.087.522	99,73
J	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	16.240.164.000	15.226.548.293	93,76
25	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	639.170.000	617.953.621	96,68
26	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	372.030.000	365.422.316	98,22
27	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	1.020.980.000	1.018.271.650	99,73
28	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	14.207.984.000	13.224.900.706	93,08
K	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	21.900.000	21.302.000	97,27
29	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)	21.900.000	21.302.000	97,27
L	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	675.880.000	663.135.846	98,11
30	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	675.880.000	663.135.846	98,11
M	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	181.742.000	167.786.906	92,32
31	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	27.330.000	26.976.600	98,71
32	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Kendaraan Bermotor	12.828.000	12.760.000	99,47
33	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	141.584.000	128.050.306	90,44
N	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	846.420.000	844.350.702	99,76
34	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk	23.261.000	23.058.000	99,13

No	Urusan/Program/kegiatan/sub kegiatan	Pagu Anggaran Perubahan Tahun 2025 (Rp)	Realisasi Anggaran Tahun 2025	
			Nominal (Rp.)	%
	Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			
35	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Kabupaten/Kota	13.450.000	13.450.000	100,00
36	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	809.709.000	807.842.702	99,77
O	Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	6.920.000	6.836.000	98,79
37	Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin	6.920.000	6.836.000	98,79
P	Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	18.552.000	18.224.000	98,23
38	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	12.710.000	12.432.000	97,81
39	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	5.842.000	5.792.000	99,14
Q	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	40.096.000	39.554.520	98,65
40	Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	8.721.000	8.721.000	100,00
41	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	31.375.000	30.833.520	98,27

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan Umum Capaian Kinerja

Dinas Perhubungan Kota Pekalongan sebagai perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perhubungan memiliki tanggung jawab untuk memastikan tercapainya sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Pelaksanaan program dan kegiatan selama tahun anggaran berjalan merupakan wujud komitmen dalam mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan daerah, melalui peningkatan kualitas pelayanan transportasi, keselamatan lalu lintas, serta tata kelola perhubungan yang efektif, efisien, dan akuntabel. Secara umum, capaian kinerja yang diraih mencerminkan tingkat keberhasilan atas target-target yang telah ditetapkan, dengan tetap memperhatikan dinamika isu strategis, kapasitas kelembagaan, serta optimalisasi sumber daya yang dimiliki sebagai dasar perbaikan dan peningkatan kinerja pada periode selanjutnya.

Dengan memperhatikan uraian dan beberapa data tersebut di atas, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Pekalongan dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan “Sangat Berhasil”. Hal tersebut didukung dengan data sebagai berikut :

1. Hasil Pengukuran Pencapaian Sasaran terhadap target pada tahun 2025 rata-rata sebesar 100,76% dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Indikator Nilai SAKIP OPD pada tahun 2025 mencapai 77,00, atau setara dengan 100,52% dari target yang ditetapkan sebesar 76,60.
 - b. Sasaran Meningkatkan Kapasitas Jalan Perkotaan
Capaian indikator Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A berhasil mencapai 28,28%. Angka ini menunjukkan pelampauan target sebesar 101% dari sasaran yang telah ditetapkan, yaitu 28%.
2. Serapan anggaran tahun 2025 pada Dinas Perhubungan Kota Pekalongan yaitu sebesar Rp26.495.373.923,00 atau 94,22% dari total anggaran sebesar Rp28.119.270.000,00 sehingga terdapat efisiensi anggaran sebesar

Rp1.623.896.077,00 atau 5,78%.

B. Permasalahan dan Langkah ke Depan

Permasalahan atau kendala yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai kinerja yang telah ditargetkan di antaranya:

1. Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) yang melakukan pengujian teknis secara rutin masih belum mencapai target;
2. Laju pertumbuhan jumlah kendaraan tidak sebanding dengan luas jalan yang tersedia, sehingga memicu kepadatan lalu lintas di area perkotaan;
3. Sering terjadi kerusakan dan kehilangan aset operasional di lapangan akibat tindakan oknum yang tidak bertanggung jawab;
4. Seluruh jenis kendaraan (besar maupun kecil) masih terkonsentrasi di tengah kota karena belum tersedianya jalur lingkar sebagai akses alternatif;
5. Belum adanya terminal khusus angkutan barang memicu aktivitas bongkar muat di pinggir jalan yang menghambat kelancaran arus lalu lintas;
6. Munculnya moda transportasi daring (*online*) berdampak pada penurunan jumlah penumpang dan operasional angkutan umum resmi (berizin);
7. Masih banyaknya truk dan kendaraan berat yang parkir atau beristirahat di bahu jalan sehingga mengganggu pengguna jalan lainnya;
8. Integrasi antar-moda yang belum optimal membuat masyarakat masih merasa kesulitan dalam mengakses layanan transportasi umum secara praktis.

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mengatasi berbagai kendala tersebut meliputi:

1. Meningkatkan kepatuhan pemilik Kendaraan Bermotor Wajib Uji (KBWU) melalui sistem pengingat dini (*SMS-Gateway*) dan pengiriman surat pemberitahuan bagi kendaraan yang terlambat uji;
2. Mengurai kemacetan di jalur utama dengan mengatur rute khusus kendaraan berat serta menerapkan skema jalur prioritas pada jam-jam sibuk;
3. Melakukan pengawasan intensif dan sosialisasi kepada masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas perlengkapan jalan agar tetap berfungsi optimal;
4. Mendorong percepatan pembangunan jalan lingkar luar dan terminal angkutan

- barang melalui pengusulan skema pembiayaan yang efektif;
5. Melakukan penyuluhan serta penempatan petugas secara rutin di jalur utama untuk menindak tegas kendaraan besar yang parkir sembarangan, terutama pada waktu padat lalu lintas;
 6. Membangun sistem transportasi umum yang saling terhubung untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam berpindah antar-moda transportasi.

LAMPIRAN

IKU PERUBAHAN 2021-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA PERUBAHAN (IKU PERUBAHAN) Dinas Perhubungan Kota Pekalongan Tahun 2021-2026

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Formulasi	Tipe Indikator	Kondisi Awal	Target						Sumber Data	Penanggung Jawab
							2021	2022	2023	2024	2025	2026		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP OPD	Indeks	Penghitungan Nilai SAKIP Tahun N yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kota Pekalongan	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	72,50	72,50	74,00	75,50	76,35	76,60	76,85	Inspektorat Daerah	Dinhub
2	Meningkatnya Kapasitas Jalan Perkotaan	Persentase Kinerja Ruas Jalan dengan Kategori A	Persen	Kinerja Ruas Jalan dengan kategori A Tahun (N) dibagi Total Ruas Jalan Tahun (N) * 100%	Data Terakhir/ Semakin Tinggi Semakin Baik / 1	28	28	28	28	28	28	28	Dinhub	Dinhub

Pekalongan, 9 Desember 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Pekalongan

M. RESTU HIDAYAT, S.SIT., MT.
NIP. 19750305 199803 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN 2025



PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. RESTU HIDAYAT, S.Si.T., MT.**

Jabatan : **Kepala Dinas Perhubungan**

selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.**

Jabatan : **Wali Kota Pekalongan**

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pekalongan, 20 Agustus 2025

**Pihak Kedua,
Wali Kota Pekalongan**



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

**Pihak Pertama,
Kepala Dinas Perhubungan**



**M. RESTU HIDAYAT, S.Si.T., M.T.
NIP. 197503051998031005**

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

PERJANJIAN KINERJA PENETAPAN TAHUN 2025

Unit Kerja: Dinas Perhubungan Kota Pekalongan

NO.	TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KETERANGAN
Tujuan :				
1.	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	78,39	Formulasi : IKM Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Bagian Organisasi
2.	Meningkatkan Layanan Transportasi Perkotaan	Tingkat Pelayanan Jalan (<i>Level of Service</i>)	B	Formulasi : Standar Nilai LOS MKJI Kemen PU Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik Sumber data : Dishub
Sasaran Strategis :				
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD	76,60	Formulasi : Hasil Nilai Evaluasi AKIP OPD Tahun N Tipe Capaian : Semakin Tinggi Semakin Baik

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Rp. 7.145.634.000,00	APBD
2. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)	Rp. 20.978.636.000,00	APBD

Pekalongan, 20 Agustus 2025

Wali Kota Pekalongan



H. ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID, S.E., M.M.

Kepala Dinas Perhubungan



M. RESTU HIDAYAT, S.SiT., M.T.
NIP. 197503051998031005

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).